



---

## Menimbang Ulang Kebijakan Seragam Sekolah: Regulasi, Tantangan, dan Dampaknya bagi Peserta Didik

Eka Elviana Batubara<sup>1</sup>, Suparto<sup>2</sup>

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [elvianabatubara@gmail.com](mailto:elvianabatubara@gmail.com)<sup>\*</sup>, [Suparto@uinjkt.ac.id](mailto:Suparto@uinjkt.ac.id)<sup>2</sup>

---

Article received: 22 Mei 2025, Review process: 02 Juni 2025,  
Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 01 Juli 2025

---

### ABSTRACT

*The school uniform policy in Indonesia is an integral component of the education system, designed to foster equality, discipline, and a collective identity among students. Although regulated under the Ministry of Education and Culture Regulation No. 50 of 2022, its implementation continues to raise issues related to economic burden, social resistance, and psychological pressure on students. This study aims to analyze the school uniform policy based on current regulations and assess its impacts from social, economic, and psychological perspectives. Employing a qualitative descriptive literature review and content analysis of regulatory documents and relevant literature, the findings indicate that the new regulation offers greater flexibility and appreciation for diversity. However, implementation remains inconsistent and is hindered by issues such as commercialization of uniforms and unequal government support. The study highlights the necessity for more inclusive, adaptive, and student-centered policies, and underscores the importance of synergy between national and local governments to ensure educational equity.*

**Keywords:** Education Policy, School Uniform, Social Justice, Inclusioit

### ABSTRAK

Kebijakan seragam sekolah di Indonesia merupakan bagian dari sistem pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai kesetaraan, kedisiplinan, dan identitas kolektif peserta didik. Meskipun telah diatur melalui Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022, pelaksanaan kebijakan ini masih memunculkan berbagai persoalan, mulai dari beban ekonomi, resistensi sosial, hingga tekanan psikologis bagi siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan seragam sekolah berdasarkan regulasi yang berlaku serta mengevaluasi dampaknya dari aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis isi terhadap dokumen regulasi dan literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi baru memberikan fleksibilitas dan penghargaan terhadap keragaman, namun implementasinya belum merata dan masih menyisakan persoalan di lapangan, seperti komersialisasi seragam dan ketimpangan bantuan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan peserta didik, serta perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keadilan dalam pendidikan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan, Seragam Sekolah, Keadilan Sosial, Inklusivitas

## PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan identitas peserta didik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya. Salah satu kebijakan yang sejak lama diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia adalah penggunaan seragam sekolah. Seragam dipandang sebagai simbol kesetaraan, kedisiplinan, dan identitas kolektif yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan tertib (Rahma et al., 2023). Penggunaan seragam juga bertujuan mengurangi disparitas sosial antar peserta didik dengan menghapuskan perbedaan penampilan yang mencolok akibat kondisi ekonomi keluarga.

Kebijakan mengenai seragam sekolah di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi resmi, terbaru melalui Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022. Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya, dan mengatur secara rinci tentang jenis seragam, pelaksanaannya di satuan pendidikan, serta prinsip-prinsip yang melandasinya seperti penghormatan terhadap keragaman dan hak individu dalam beragama (Widjayanti et al., 2024). Selain itu, pemerintah juga menekankan bahwa seragam tidak boleh menjadi beban ekonomi bagi peserta didik dan keluarganya. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang memberlakukan standar seragam dengan harga tinggi tanpa kebijakan kompensasi yang memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan.

Meskipun memiliki tujuan mulia, implementasi kebijakan seragam sekolah tidak terlepas dari polemik dan tantangan. Beberapa kelompok masyarakat menilai bahwa seragam membatasi kebebasan berekspresi peserta didik dalam memilih busana sesuai kepribadian mereka (Pikri et al., 2022). Dalam perspektif pendidikan yang humanistik, ekspresi diri merupakan aspek penting dalam proses pembentukan identitas dan penguatan harga diri siswa. Ketika siswa dibatasi oleh seragam yang kaku dan tidak inklusif, maka ada potensi terhambatnya perkembangan kepribadian, terutama pada masa remaja yang secara psikologis sedang mencari jati diri.

Dari sisi ekonomi, kebijakan seragam juga menjadi perdebatan serius, khususnya dalam konteks ketimpangan sosial. Keluarga dengan ekonomi rendah kerap mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban membeli seragam lengkap yang diwajibkan oleh sekolah. Meskipun regulasi telah menyatakan bahwa seragam tidak boleh menjadi beban finansial, kenyataannya program bantuan seragam belum merata secara nasional. Beberapa daerah memang telah menginisiasi program bantuan seragam (misalnya DKI Jakarta dan Jawa Timur), namun tidak semua wilayah memiliki kebijakan afirmatif yang sama (Lorensa et al., 2024).

Secara sosial dan psikologis, seragam sekolah memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ia memperkuat solidaritas dan rasa memiliki terhadap sekolah, namun di sisi lain, ia juga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis jika diberlakukan secara kaku dan tidak kontekstual. Siswa dengan kebutuhan khusus, latar belakang budaya yang berbeda, atau kondisi emosional tertentu dapat merasa terkekang oleh aturan seragam yang seragam. Oleh sebab itu, pendekatan yang lebih fleksibel dan

---

manusiawi dalam kebijakan seragam sangat diperlukan agar kebijakan ini tidak menjadi instrumen eksklusif, melainkan inklusif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan seragam sekolah di Indonesia berdasarkan regulasi yang berlaku, serta menelaah dampaknya terhadap peserta didik dari aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Melalui pendekatan studi literatur, kajian ini juga bertujuan memberikan alternatif solusi kebijakan yang lebih adaptif dan adil dalam pelaksanaannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis kebijakan seragam sekolah di Indonesia berdasarkan regulasi yang berlaku dan dampaknya terhadap peserta didik. Sumber data diperoleh dari dokumen primer seperti Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022, serta literatur sekunder berupa artikel jurnal, laporan penelitian, dan kebijakan pemerintah terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengidentifikasi pola, makna, dan keterkaitan antar informasi yang relevan. Selain itu, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan dampak kebijakan dari aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber untuk memastikan akurasi dan objektivitas hasil kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Regulasi Kebijakan Seragam Sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Seragam sekolah merupakan simbol formalitas yang telah melekat dalam sistem pendidikan Indonesia sejak lama. Fungsinya tidak hanya sebagai identitas institusi pendidikan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kedisiplinan, rasa kebersamaan, dan kesetaraan di antara peserta didik (Priambodo & Ikhwandi, 2024). Pemerintah mengatur penggunaan seragam sebagai bagian dari kebijakan yang menjamin keteraturan dalam proses belajar-mengajar, sehingga menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk budaya sekolah yang positif.

Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 menjadi regulasi terbaru yang mengatur secara rinci klasifikasi seragam sekolah, yaitu seragam nasional, seragam khas sekolah, dan pakaian adat. Ketiga jenis seragam ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menekankan keseragaman, tetapi juga memberikan ruang bagi identitas lokal dan budaya. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan menunjukkan banyak sekolah yang masih belum fleksibel dalam menetapkan seragam khas, bahkan cenderung membebani orang tua siswa dengan biaya tinggi.

Salah satu prinsip utama dalam regulasi ini adalah bahwa seragam tidak boleh menjadi beban ekonomi. Hal ini tercermin dalam pasal-pasal yang menyarankan agar sekolah mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam menentukan model dan jenis seragam. Meskipun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa harga seragam di beberapa daerah tetap tinggi, tanpa subsidi atau keringanan. Akibatnya, siswa dari keluarga miskin sering kali mengalami

tekanan sosial karena tidak mampu membeli seragam lengkap sesuai standar sekolah.

Tantangan lain dalam implementasi regulasi adalah kurangnya pengawasan atas praktek komersialisasi seragam oleh sekolah atau koperasi sekolah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sekolah justru memanfaatkan kebijakan seragam sebagai peluang usaha, yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial dalam pendidikan. Hal ini memperparah kesenjangan antara peserta didik dari latar belakang ekonomi berbeda.

Seragam juga dapat berdampak pada kebebasan berekspresi peserta didik. Dalam konteks pendidikan yang seharusnya mendukung pertumbuhan kepribadian dan kreativitas, aturan seragam yang terlalu kaku bisa menjadi hambatan psikologis. Terlebih bagi siswa di masa remaja, ekspresi diri melalui busana sering kali menjadi bagian dari proses pencarian identitas diri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan satuan pendidikan untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan kebijakan seragam agar selaras dengan prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberpihakan pada peserta didik.

### **Perbandingan Regulasi: Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 dan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022**

Regulasi mengenai seragam sekolah telah mengalami pembaruan signifikan, yang ditandai dengan perubahan dari Permendikbud No. 45 Tahun 2014 ke Permendikbudristek No. 50 Tahun 2022. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut filosofi dan pendekatan baru dalam menyikapi kebutuhan peserta didik yang semakin beragam. Misalnya, pendekatan terbaru lebih mempertimbangkan keragaman budaya dan konteks sosial peserta didik.

Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 membawa paradigma baru dalam hal fleksibilitas penggunaan pakaian adat dan penyesuaian seragam khas sekolah. Kebijakan ini memungkinkan sekolah menyesuaikan model seragam dengan karakter lokal, sekaligus menghindari pemaksaan model seragam tunggal yang dapat mengikis keragaman budaya. Aspek ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam peraturan sebelumnya. Berikut adalah perbandingan antara kedua regulasi yang relevan:

*Tabel 1. Perbandingan Permendikbud 45/2014 dan Permendikbudristek 50/2022*

<b>Aspek</b>	<b>Permendikbud 45/2014</b>	<b>Permendikbudristek 50/2022</b>
Fokus	Kedisiplinan dan keseragaman	Keadilan sosial, penghargaan budaya
Jenis Seragam	Nasional dan Khas Sekolah	Nasional, Khas Sekolah, dan Pakaian Adat
Fleksibilitas	Relatif rendah	Lebih fleksibel terhadap konteks lokal

Aspek	Permendikbud 45/2014	Permendikbudristek 50/2022
Penekanan Biaya	Tidak ditegaskan	Menyebutkan tidak boleh membebani orang tua
Sanksi dan Pengawasan	Umum	Ditekankan perlindungan hak peserta didik

Meskipun ada perubahan positif dalam regulasi baru, pelaksanaannya belum merata. Banyak sekolah masih menerapkan kebijakan lama karena kurangnya sosialisasi atau resistensi terhadap perubahan. Hal ini memperlihatkan perlunya pendampingan dan pengawasan agar transisi kebijakan dapat berjalan optimal.

Evaluasi terhadap regulasi harus mempertimbangkan dampak langsung kepada peserta didik, termasuk bagaimana persepsi mereka terhadap aturan baru ini, dan apakah benar mampu mengurangi beban atau justru memperkuat eksklusivitas di lingkungan sekolah.

### Dampak Sosial dan Psikologis Seragam Sekolah terhadap Peserta Didik

Penggunaan seragam memiliki dampak ganda terhadap kehidupan sosial peserta didik. Di satu sisi, seragam dapat menciptakan rasa persatuan dan mengurangi kecemburuan sosial karena semua siswa tampil dengan pakaian yang seragam. Hal ini membantu membentuk budaya kolektif dan solidaritas di lingkungan sekolah (Rahma et al., 2023). Namun di sisi lain, seragam yang terlalu kaku dapat menimbulkan ketidaknyamanan, terutama pada siswa yang ingin mengekspresikan identitas diri.

Bagi siswa dari keluarga miskin, seragam juga dapat menjadi sumber tekanan sosial. Ketika tidak mampu membeli seragam baru atau lengkap, mereka bisa mengalami perlakuan diskriminatif atau stigma dari teman sebaya. Hal ini berdampak pada kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa, yang seharusnya menjadi prioritas dalam pendidikan.

Dalam konteks psikologis, seragam yang tidak sesuai dengan kenyamanan atau preferensi siswa dapat memicu resistensi terhadap aturan sekolah. Ketidaknyamanan dalam berpakaian setiap hari turut memengaruhi suasana hati, performa belajar, bahkan kesehatan mental. Oleh karena itu, sekolah harus mampu menyeimbangkan antara aturan dan ruang untuk kenyamanan personal.

Beberapa studi menyarankan bahwa keterlibatan siswa dalam merancang seragam sekolah dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap sekolah dan meminimalisasi resistensi. Ketika suara peserta didik didengar, maka peraturan pun dapat diterima dengan lebih baik (Pikri et al., 2022). Ini sejalan dengan prinsip pendidikan partisipatif dan demokratis.

Selain itu, perspektif gender juga penting dipertimbangkan. Model seragam yang tidak sensitif gender bisa menjadi sumber ketidaknyamanan bagi sebagian siswa, khususnya mereka yang mengalami disforia gender atau berasal dari budaya berbeda. Oleh karena itu, kebijakan seragam sekolah hendaknya dirancang dengan

---

mempertimbangkan perspektif psikologis dan sosiologis siswa, tidak semata-mata dari sisi administratif dan estetika institusi.

### **Implikasi Ekonomi dan Arah Kebijakan yang Lebih Inklusif**

Dari sisi ekonomi, kebijakan seragam sekolah membawa beban tersendiri bagi keluarga berpenghasilan rendah. Meskipun terdapat klausul bahwa seragam tidak boleh membebani, dalam praktiknya pembelian seragam tetap menjadi salah satu pengeluaran besar ketika memasuki tahun ajaran baru. Hal ini diperburuk oleh tidak meratanya bantuan dari pemerintah daerah.

Beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur telah menginisiasi program bantuan seragam, namun implementasinya belum menyeluruh. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas lokal. Dalam konteks inilah, penting untuk mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan bantuan seragam sebagai bagian dari kebijakan afirmatif pendidikan.

Koperasi sekolah juga memiliki peran penting. Alih-alih menjadi mitra penyedia dengan harga terjangkau, banyak koperasi justru menjadi sarana komersialisasi seragam dengan harga tinggi. Perlu ada regulasi ketat terhadap koperasi agar orientasi mereka tetap dalam bingkai pelayanan, bukan keuntungan.

Di sisi lain, kebijakan seragam sekolah juga berimplikasi pada industri tekstil lokal dan UMKM. Jika dirancang dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyediaan bahan seragam oleh pelaku usaha kecil. Ini memerlukan desain kebijakan terintegrasi yang melibatkan sektor pendidikan, industri, dan sosial.

Arah kebijakan ke depan perlu memperkuat prinsip keadilan, inklusivitas, dan partisipasi. Seragam harus dirancang tidak hanya dengan pertimbangan formalitas, tetapi juga kenyamanan, keberagaman, dan kearifan lokal. Sekolah bisa diberi ruang untuk melakukan inovasi dengan tetap mengacu pada prinsip dasar regulasi nasional. Dengan demikian, kebijakan seragam sekolah tidak hanya menjadi aturan berpakaian, tetapi juga cerminan dari sistem pendidikan yang adil, manusiawi, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

### **SIMPULAN**

Kesimpulan, kebijakan seragam sekolah di Indonesia merupakan instrumen pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur keseragaman pakaian, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keragaman budaya serta kondisi sosial-ekonomi peserta didik. Meskipun Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 telah menawarkan paradigma baru yang lebih fleksibel dibanding regulasi sebelumnya, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek beban ekonomi, kebebasan berekspresi, dan kesenjangan pelaksanaan di berbagai daerah. Dampak sosial dan psikologis dari kebijakan ini juga tidak bisa diabaikan, terutama bagi siswa dari kelompok rentan dan minoritas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya responsif secara regulatif, tetapi juga empatik secara sosial, dengan

---

memperhatikan kebutuhan riil peserta didik dan kondisi lokal. Pendekatan yang partisipatif, terintegrasi, dan berpihak pada kesejahteraan peserta didik akan menjadi kunci terciptanya sistem kebijakan seragam yang adil, manusiawi, dan mendukung tujuan pendidikan nasional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Astifionita, R. V. (2024). Memahami dampak bullying pada siswa sekolah menengah: Dampak emosional, psikologis, dan akademis, serta implikasi untuk kebijakan dan praktik sekolah. *Lebah*, 18(1), 36–46.
- Lorensa, D., Ramadhan, M. R., & Jabbar, A. (2024). Strategi pemerintah daerah dalam penanganan anak putus sekolah di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(4).
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1–12.
- Pikri, Z., Syadzali, A., & Amaly, N. (2022). Pilihan versus kewajiban: Perdebatan pengaturan jilbab di sekolah negeri di Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(1), 107–120.
- Priambodo, R. B., & Ikhwandi, M. R. (2024). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di SDN Sumpat Sidoarjo. *Journal of Early Childhood and Islamic Education*, 3(1), 128–136.
- Rahma, M., Susanti, R., & Melilinda, M. (2023). Meningkatkan mutu peserta didik melalui pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. *Jurnal Adijaya Multidisiplin*, 1(1), 64–75.
- Rahmawati, F. N., & Aji, G. G. (2025). Strategi branding SD Al Hikmah Surabaya untuk mempertahankan citra sekolah Islam segmen atas. *The Commercium*, 9(1), 447–457.
- Sadri, I. (2024). Pengajaran bahasa Inggris dan nilai-nilai keislaman: Studi kasus sekolah Islam di Kota Medan, Indonesia. [Artikel belum terbit dalam jurnal ilmiah; sumber perlu diperjelas]
- Saepudin, E. A., Al Wajir, D. Q., Prahima, P., Rachman, A., & Magdalena, M. (2024). Sosialisasi di sekolah se-Kota Serang wajah baru seragam sekolah di Indonesia sebagai pemantik semangat belajar dalam upaya menciptakan nuansa baru dunia pendidikan. *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia (JTPI)*, 2(2), 168–172.
- Widjayanti, R. P., Muhimmah, H. A., & Istiqfaroh, N. (2024). Pengaruh kurikulum di Jepang dan di Indonesia terhadap kualitas pendidikan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 7506–7543.